

SKRIPSI

**UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA SUNGAI LARU
KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN
LAHAT SUMATERA SELATAN**



**MUHAMMAD YUSUF
07021281823089**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

SKRIPSI

**UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA SUNGAI LARU
KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN
LAHAT SUMATERA SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**MUHAMMAD YUSUF
07021281823089**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUNGAI LARU KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi

Oleh :

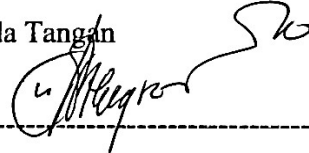
Muhammad Yusuf
07021281823089

Indralaya , November 2022

Pembimbing I

1. Dra. Dyah Hapsari ENH, M. Si
NIP. 196010021992032001

Tanda Tangan



Pembimbing II

2. Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 196405051993022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP.198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA SUNGAI LARU
KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN
LAHAT SUMATERA SELATAN**

Skripsi

**MUHAMMAD YUSUF
07021281823089**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 10 Februari 2023**

Pembimbing :

1. Dra. Dyah Hapsari ENH, M. Si
NIP. 196010021992032001
2. Dra. Yusnaini, M. Si
NIP. 1964050519993022001

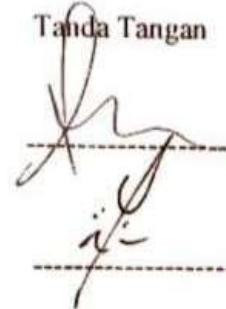
Tanda Tangan



Penguji :

1. Abdul Kholek, S.Sos., MA
NIP. 198509072019031007
3. Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos
NIP. 199206062019032025

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dean FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 07021281823089

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 2 Februari 2023
Yang buat pernyataan,

Muhammad Yusuf
NIM. 07021281823009

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- 1 “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS Al Zalzalah :7-8)
- 2 “jika tidak bisa berbuat baik karena bukan seiman, maka berbuat baiklah karena sesama manusia” Sayyidina Ali.

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tersayang (Kasmuddin dan Msy. Dewi Asnani)
2. Bunda Tersayang (Msy. Mazena)
3. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M. Si dan Ibu Dra. Yusnaini, M. Si
4. Teman-teman pejuang skripsi di kampus
5. Universitas Sriwijaya dan Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat Sumatera Selatan” sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Serta tak lupa Sholawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa umat islam dari zaman kegelapan hingga terang benderang sekarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu memberikan petunjuk dan pertolong sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Kepada Ayah dan Ibu, Kasmuddin dan Msy. Dewi Asnani yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materil kepada penulis hingga bisa pada tahap penyelesaian skripsi dan memberikan dorongan kepada penulis agar lebih baik kedepannya. Serta hal yang diluar penulis ketahui yang memberikan hal terbaik kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bunda Msy. Mazena yang telah memberi semangat dan mendukung penulis untuk menyelesaikan dengan baik sesuai dengan kesanggupan penulis tanpa menuntut apapun.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya

5. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya
6. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan sosiologi dan Mbak Gita Isyanawulan, S. Sos., MA. Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M. Si selaku dosen pembimbing I yang telah baik kepada penulis dengan memberikan banyak masukan, nasihat serta semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Dra. Yusnaini, M. Si dosen pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan arahan, masukan, dan kesabaran dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Mbak Safira Soraida, S.Sos., M.Sos selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan
10. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bahan yang dapat digunakan penulis selama masa perkuliahan dan pasca kampus
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memudahkan jalannya pemberkasan selama di kampus
12. Kepada Mba Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan sosiologi yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi jurusan
13. Seluruh informan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia membantu peneliti dalam memberikan informasi dalam proses wawancara, sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mendapatkan data dan juga informasi yang dibutuhkan
14. Terimakasih kepada Maya Marsela S. Sos, Firdayanti S. Sos, Resti Indah S. Sos, Lingga Artha S. Sos, Yudha Herdianto S. Sos, dan Jupriansyah, SE yang selalu membantu penulis dalam proses

bimbingan sehingga penulis dapat melakukan bimbingan tanpa adanya kendala yang berat.

15. Terimakasih kepada teman – teman BGOT yang telah memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam segala hal.
16. Terimakasih kepada teman – teman Croco University Hanna Hafizoh, S. Hi, Mazida Ulandari S. Si, Vira Paragita S. Si, Tiara Dwi Putri S. Ap yang telah memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam segala hal.
17. Untuk teman-teman kelas ganjil angkatan 2018, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya selama masa kuliah *offline* maupun *online* yang sangat berkesan kepada penulis.
18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing this hardwork, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari.

Wassalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 10 Februari 2023

Penulis,

Muhammad Yusuf

07021281823089

RINGKASAN

UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA SUNGAI LARU KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

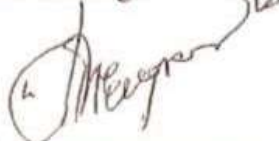
Penelitian ini membahas mengenai upaya dan faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan jumlah informan utama sebanyak lima orang dan pendukung sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam pada informan, dokumentasi serta studi kepustakaan, dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Sutarto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan desa di desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat Sumatera Selatan adalah mengadakan musyawarah desa bersama masyarakat desa Sungai Laru dan membuat peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat desa Sungai Laru. Lalu faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan desa di desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat Sumatera Selatan adalah pendapatan yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kurangnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tugas, Pengawas Pemerintahan Desa

Indralaya, 10 Februari 2023

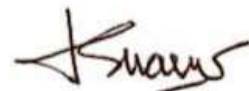
Mengetahui/menyetujui

Pembimbing I



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Pembimbing II



Dra. Yusnaini, M. Si
NIP. 196405051993022001

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

SUMMARY

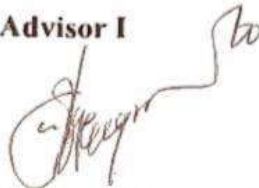
THE EFFORTS OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN IMPLEMENTING THE DUTY AS SUPERVISOR OF THE GOVERNMENT OF SUNGAI LARU VILLAGE, KIKIM TENGAH DISTRICT, LAHAT DISTRICT, SOUTH SUMATERA

This study discusses the efforts and inhibiting factors of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its duties as supervisor of the government of Sungai Laru village, Kikim Tengah sub-district, Lahat district, South Sumatra. The method used in this study is descriptive qualitative with the determination of informants using a purposive technique with five main informants and six supporters. Data collection techniques by observing, in-depth interviews with informants, documentation and literature study were analyzed using the role theory put forward by Sutarto. South Sumatra Lahat district is to hold village meetings with the Sungai Laru village community and make village regulations based on the aspirations of the Sungai Laru village community. Then the inhibiting factors for the Village Consultative Body (BPD) in carrying out their duties as supervisors of village administration in Sungai Laru village, Kikim Tengah sub-district, Lahat district, South Sumatra, are income that is not in accordance with work as a member of the Village Consultative Council (BPD), people who lack participation in conveying aspirations to members of the Village Consultative Council (BPD) and lack of knowledge of members of the Village Consultative Council (BPD) in carrying out their duties.

Keywords: Village Consultative Body (BPD). Duties, Organizer Village Administration

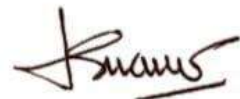
Certify,

Advisor I



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Advisor II



Dra. Yusnaini, M. Si
NIP. 196405051993022001

***Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University***



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan	iv
Surat Pernyataan.....	v
Motto dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan.....	x
Summary	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7

BAB II

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.2. Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1. Konsep Peran	16
2.2.2. Definisi Kelembagaan.....	19
2.2.3. Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD)	20
2.2.4 Pemerintah Desa	22

BAB II

4.3.5 Sarana dan Prasarana	48
4.3.6 Gambaran Umum Informan	49

BAB V

Hasil dan Pembahasan

5.1 Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.....	56
5.1.1 Upaya Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa di Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	59
5.1.2 Harapan Masyarakat Untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	66
5.1.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	66
5.2 Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.....	80
5.2.1 Kurangnya Prasarana Untuk Menjalankan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	82
5.2.2 Masyarakat Yang Kurang Berpartisipasi Dalam Menyampaikan Aspirasi Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	85

5.2.3 Kurangnya Pengetahuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas	87
---	----

BAB VI

Penutup

6.1 Kesimpulan	91
----------------------	----

6.2 Saran.....	92
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	97
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang	14
Tabel 3.4. Tabel Fokus Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat Berdasarkan Kategori Usia Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Desa/kelurahan di Kecamatan Kikim Tengah Tahun 2021	45
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kecamatan Kikim Tengah menurut Desa/kelurahan Tahun 2021.....	45
Tabel 4.5 Jarak Tempuh Desa Sungai Laru ke Ibukota kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat dan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan	46
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Sungai Laru Menurut Umur Pada Tahun 2021	47
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Sungai Laru Menurut Pendidikan Pada Tahun 2021.....	48
Tabel 4.10 Informan Utama	51
Tabel 4.11 Informan Pendukung.....	53
Tabel 5.1 Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Tugas sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	72
Tabel 5.2 Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Tugas sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	87

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 5.1 Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan	56
Bagan 5.2 Faktor Penghambat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu pemerintahan dalam satuan terkecil di dalam lingkup pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas sehari – hari pemerintahan desa dibantu oleh lembaga desa yaitu Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa diharapkan oleh setiap masyarakat Indonesia baik itu masyarakat biasa maupun pemerintah mampu memajukan, memberikan arahan dan masukan untuk pemerintah desa dalam hal menyusun dan menetapkan peraturan pemerintahan desa (Setiawati, 2018).

Dalam rangka memperkuat operasional pemerintahan tingkat desa maka dibentuklah Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, peraturan ini melengkapi peraturan yang telah dibentuk sebelumnya dengan cara mengatur kewenangan desa dengan kemudian dibentuklah suatu organisasi yang disebut Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau biasa disebut dengan lembaga masyarakat yang melakukan fungsi pemerintahan desa dengan beranggotakan wakil dari penduduk – penduduk desa yang dipilih secara demokratis untuk mengatur kepentingan – kepentingan masyarakat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses atau dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau juga dapat dipilih berdasarkan perwakilan dari kesepakatan penduduk desa (Prasetya, 2016).

Pengertian Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menurut Solekhan menjelaskan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan rekan kerja

kepala desa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ini adalah wakil – wakil yang telah dipilih oleh penduduk desa berdasarkan wilayah – wilayah yang diwakilkan oleh mereka dan pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis (Hartati, 2018).

Pembahasan tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang fungsi dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan juga Undang – Undang ini juga membahas tentang masa jabatan anggota BPD yang hanya bisa menjabat paling banyak sebanyak 3 kali baik itu secara berturut – turut maupun tidak berturut – turut. Lalu, dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan juga menyepakati rancangan peraturan – peraturan desa yang akan dibuat bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara utama pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan dibantu atau didukung oleh perangkat – perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, suatu pemerintahan sangat diperlukan untuk mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakatnya untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, dan juga memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dengan adanya suatu pemerintahan, semua wilayah memiliki pemerintahan dan batas – batas kontrolnya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu pemerintahan desa sangatlah penting untuk diketahui dan dijalankan dengan sebagai mana mestinya karena pemerintahan desa adalah salah satu penunjang utama dari pemerintahan pusat suatu negara (Sugiman, 2018).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Pasal 1 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah

kepala desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur utama dalam penggerak pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan kepentingan masyarakat pedesaan dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Patrasius, 2019).

Menurut Romli & Nurlia mengartikan bahwa pemerintahan desa adalah salah satu bagian penting yang tidak mungkin dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan paling bawah atau dengan tingkat terkecil pemerintahan desa sangatlah penting dalam berjalannya pemerintahan suatu negara karena pemerintahan desa adalah pemerintahan yang bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa terkecuali, pemerintahan desa adalah penjalan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu negara yang sudah diamanatkan dalam konstitusi (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan masyarakat dan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembangunan desa karena pembangunan desa semata – mata hanya dilakukan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jika nantinya kesadaran masyarakat sudah muncul maka rasa kesadaran ini sangat berfungsi atau berguna dalam melakukan pembangunan desa, karena dengan adanya rasa kesadaran ini maka masyarakat akan berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dihaparkan langsung tepat sasaran dan hanya dilakukan semata – mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Yuhandra & Tarsim, 2018).

Sejalan dengan penjelasan di atas, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang efektif sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan bernegara. Pemerintah desa adalah salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa, pemerintah desa harus mampu aktif membuat keputusan yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakatnya baik

dalam hal kehidupan maupun hal pembangunan. Maka dari pada itu pemerintah desa harus dapat melaksanakan fungsinya dengan baik terutama dalam menjalin hubungannya bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa tersebut (Yuhandra & Tarsim, 2018).

Pelaksanaan Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan terjalin dengan baik karena berdasarkan peran tersebut dapat menghasilkan kemajuan dalam hal kehidupan bermasyarakat dan desa. Menurut Sutarto peran memiliki tiga komponen utama yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran. Konsepsi peran adalah kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu kondisi tertentu, harapan peran adalah harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak, lalu pelaksanaan peran adalah perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen tersebut sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya maka interaksi sosial akan terjalin dengan lancar dan berkesinambungan (Sutarto, 2009).

Menurut Midgley salah satu strategi dari pembangunan sosial adalah pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui agen – agennya seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan agen atau lembaga pemerintahan yang ditempatkan dalam lingkungan desa (Midgley, 2020). Selain pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan dalam perencanaan. Perencanaan adalah sebuah upaya pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek rasional untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi daripada masa sekarang (Taufiqurokhman, 2008). Lalu menurut Payaman J. Simanjuntak menjelaskan bahwa perencanaan sosial adalah suatu usaha yang sadar untuk menentukan urutan operasional untuk mencapai suatu tujuan dalam perbaikan sosial yang diinginkan. Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok mengenai masalah – masalah yang ada di masyarakat, menganalisisnya lalu mengambil tindakan tentang perencanaan mana yang paling efektif dan memungkinkan (Yusri & Syafri, 2021). Berdasarkan pengertian di atas

maka Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam proses memajukan suatu desa melalui pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) hanya dianggap sebagai formalitas saja di desa tersebut, yang dimana para anggotanya bekerja secara pasif dan jarang menempatkan diri di tengah – tengah masyarakat. Menurut salah satu warga desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, menerangkan bahwa para anggota Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) tersebut hanya sebatas tercatat sebagai anggota saja namun banyak yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut didukung dengan tidak tahunya masyarakat tentang siapa saja yang menjadi anggota dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) tersebut sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti untuk mengambil judul ini, karena Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang ada di dalam lingkup pedesaan yang berfungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, jika Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka perkembangan di desa tersebut akan terhambat juga karena tidak berjalannya salah satu anggota penggerak pemerintahan desa setempat. Selain itu, warga desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat banyak yang berpendapat pembangunan yang dilakukan di desa Sungai Laru dinilai tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar seperti contoh salah satu warga menyebutkan bahwa jalan yang ada di desa tersebut perlu untuk diperbaiki sebagai akses utama warga dalam melakukan pekerjaan sehari – hari namun pembangunan yang dilakukan malah bukan yang merupakan disarankan oleh masyarakat desa melainkan membangun perlintasan jogging yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasannya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah di desa tersebut. Namun, di sisi lain anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Laru menilai bahwa pembangunan ini

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dimana pada situasi ini adalah anggota dari Karang Taruna desa Sungai Laru yang meminta untuk dibuatkannya lintasan jogging dan juga lapangan voli. Kejadian ini juga menjadi alasan peneliti tertarik dalam mengambil penelitian ini karena selaras dengan konsentrasi yang peneliti ambil yaitu perencanaan sosial peneliti berharap dari penelitian ini bisa memajukan desa tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan maupun pembangunan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai langkah awal untuk menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka perlu membatasi rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?
2. Apa faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan distribusi untuk pengembangan ilmu – ilmu sosial, khususnya di bidang sosiologi yang berkaitan dengan perencanaan sosial dan pembangunan sosial serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan:

1. Memberikan sumbangan dan referensi bagi segala pihak termasuk mahasiswa yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian sejenis terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Agar dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintah terkait dengan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan perencanaan yang akan dilakukan terutama di desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi Edisi 8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Belajar.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kemendagri, T. (2018). *Buku Panduan BPD Tahun 2018*. Jakarta: Kemendagri.
- Midgley, J. (2020). *Pembangunan Sosial Teori & Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Yusri, M., & Syafri, S. (2021). *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Jurnal :

Hartati, R. (2018). Optimizing the Functions of the Village Consultative Board in Realizing the Principles of Good Governance. *Jurnal Moderat*, 534(4), 114–123.

Karinda, K. (2019). *Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. 5(April), 108–114.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 325–343.
<https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>

Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). *Analisis Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa*. 12.

Masuara, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Politico*, 3(1), 1–8.

Muthiawanthi. (2017). Tantangan “ Role ”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 104–114.

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan Dan Sosial Politik, 4(2), 161–175.

- Nur Ariyati, S., & Sjaf, S. (2015). Efektivitas Kelembagaan Desa Dalam Praktik Demokrasi Di Desa Kelangdepok, Pemalang, Jawa Abstract Tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 200–209. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9426>
- Patrasius. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 733–1742.
- Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 413–586.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Yuhandra, E., & Tarsim. (2018). Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>